



HAK ANAK DALAM KEBIJAKAN DAN KODE ETIK

PEDOMAN UNTUK PERUSAHAAN



Save the Children

unicef 
for every child

HAK ANAK DALAM KEBIJAKAN DAN KODE ETIK

Pedoman untuk Perusahaan

UNICEF www.unicef.org/csr bekerjasama dengan Save the Children www.savethechildren.org

Ucapan terima kasih, *disclaimer*, dan hak cipta

Draf pertama dari publikasi ini dikembangkan oleh Christine Watkins dan Amaya Gorostiaga, dengan dibantu oleh sejumlah kontributor, meliputi Luisa Ekelund Book, Save the Children; Rachel Davis, SHIFT; Elissa Goldenberg, BSR; Anita Househam, UN Global Compact; Matthias Leisinger, Kuoni; Lulu Li Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA; Julia Olofsson, IKEA; Benjamin Smith, ILO; Nick Weatherill, International Cocoa Initiative.

Setiap pengacuan/perujukan pada situs selain UNICEF tidak dapat diartikan sebagai dukungan UNICEF atas keakuratan informasi dan pendapat yang disampaikan dalam situs tersebut.. Hal ini hanya dimaksudkan sebagai contoh pembelajaran mengenai bagaimana perusahaan melibatkan pemangku kepentingan mereka dalam isu hak anak.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi www.unicef.org/csr

September 2013

© 2013 United Nations Children's Fund (UNICEF), Jenewa

BAGIAN SATU	
Latar belakang dan pendahuluan	1
1.1. Mengenai pedoman untuk perusahaan	1
1.2 Latar belakang dari Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak	1
1.3 Mengapa mengikutsertakan Hak Anak?	2
BAGIAN DUA	
Memulai: Mengikutsertakan hak anak ke dalam kebijakan dan kode etik	5
2.1. Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan	5
2.2 Proses untuk mengintegrasikan hak anak	5
BAGIAN TIGA	
Elemen-elemen hak anak di dalam kebijakan dan kode etik perusahaan	7
3.1 Elemen-elemen umum dari hak anak untuk seluruh perusahaan (Prinsip No. 1)	7
3.2 Elemen spesifik dari hak anak berdasarkan Prinsip no. 2-10	8
LAMPIRAN	
Sumber-sumber eksternal bagi perusahaan dan analisis konteks hak anak	25

LATAR BELAKANG DAN PENDAHULUAN

1.1 Mengenai pedoman untuk perusahaan ini

Pedoman ini merekomendasikan cara-cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menginkorporasi hak anak ke dalam kebijakan dan kode etik mereka, berdasarkan pada Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak melebihi aspek-aspek tradisional seperti pekerja anak dan filantropi. Menerangkan elemen-elemen hak anak yang relevan bagi seluruh perusahaan dan dimaksudkan untuk bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi – mengikutsertakan elemen-elemen yang dapat diadopsi dan diintegrasikan perusahaan sesuai keperluannya, berdasarkan risiko dan peluang terbesar yang ada.

Meskipun perusahaan tidak perlu merasa wajib mengembangkan kebijakan khusus untuk hak anak, penting bagi perusahaan untuk menyatakan komitmen untuk memenuhi kewajiban mereka pada seluruh isu hak asasi manusia (HAM) – termasuk juga hak anak – di dalam kebijakan dan kode etik perusahaan dan, bila isu bersifat serius, mengikutsertakan elemen kebijakan dan pembuatan kode etik yang dapat mengatasi dampak hak anak tertentu. Isu-isu ‘serius’ dalam konteks hak anak merefleksikan perspektif anak-anak sebagai *stakeholder* yang penting; mereka harus dipertimbangkan dari segi dampak yang dirasakan oleh anak-anak, daripada yang dirasakan oleh perusahaan.

Fokus dari bagian 2 adalah memulai proses mengintegrasikan elemen-elemen hak anak ke dalam komitmen perusahaan guna membentuk ekspektasi bagi personil, pemasok, pelanggan dan mitra bisnis yang lain. Bagian 3 menerangkan elemen-elemen yang harus dipertimbangkan oleh seluruh perusahaan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan HAM dan kebijakan lainnya, berdasarkan Prinsip 1. Bagian ini juga menerangkan rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan berdasarkan dampak perusahaan, baik yang langsung maupun tidak langsung, berdasarkan Prinsip 2-10. Informasi yang terkandung di dalam Prinsip 4 menjelaskan bagaimana perusahaan sebaiknya mengembangkan kebijakan atau kode etik khusus untuk perlindungan anak.

1.2 Latar belakang dari Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak

Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak memberikan lensa hak anak untuk standar global mengenai Bisnis dan HAM yang ditetapkan oleh Kerangka Kerja *Guiding Principles on Business and Human Rights for Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy.’*¹

Setiap Prinsip menerangkan tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk menghormati hak anak, dan juga tindakan-tindakan yang direkomendasikan untuk mendukung hak anak di tempat kerja, pasar dan masyarakat. Dengan demikian, Prinsip-prinsip ini bermaksud untuk membantu perusahaan memahami lebih baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak di berbagai konteks, termasuk dalam mempekerjakan pekerja muda, praktik pemasaran, berinteraksi dengan masyarakat lokal dan mengoperasikan bisnis di situasi darurat.

¹ Untuk dapat mengakses dokumen ‘Guiding Principles’ see: www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home.

Prinsip-prinsip ini dibentuk berdasarkan hak-hak yang diterangkan dalam Konvensi Hak Anak,² yang menyediakan landasan bagi hak anak dan mengakui pentingnya interdependensi antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak. Konvensi tersebut menetapkan bahwa hak anak harus dilindungi oleh negara sementara Prinsip-prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak menyediakan kerangka operasional bagi perusahaan untuk menghormati dan mendukung hak-hak tersebut.

Prinsip-prinsip ini juga dibentuk berdasarkan Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 182 tentang bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak dan No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan kerja.³ Sebagaimana diterangkan di Prinsip 1, sebuah perusahaan harus melakukan kajian dampak usaha terhadap HAM dengan mengacu pada instrumen hukum – termasuk Konvensi Hak Anak dan protokol operasional-nya, serta Konvensi ILO no. 138 dan 182 – untuk mengidentifikasi bagaimana dampak perusahaan terhadap hak anak.

Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak

Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak dikembangkan melalui proses yang dipimpin oleh UNICEF, *United Nations Global Compact* dan *Save the Children* – bersama dengan perusahaan dan *stakeholder* lainnya – dan menyerukan kepada perusahaan agar:

1. Memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak anak dan berkomitmen untuk mendukung hak asasi anak.
2. Berkontribusi terhadap penghapusan pekerja anak, termasuk di seluruh aktivitas perusahaan dan relasi perusahaan.
3. Menyediakan pekerjaan layak bagi pekerja muda, orangtua dan wali
4. Memastikan perlindungan dan keamanan anak-anak di seluruh aktivitas dan fasilitas perusahaan.
5. Memastikan produk dan jasa senantiasa aman, dan mengupayakan dukungan terhadap hak anak melaluinya
6. Menggunakan strategi pemasaran dan pengiklanan yang menghormati dan mendukung hak anak.
7. Menghormati dan mendukung hak anak-anak sehubungan dengan lingkungan hidup dan akuisisi serta penggunaan tanah.
8. Menghormati dan mendukung hak anak dalam pengaturan keamanan
9. Membantu melindungi anak yang terdampak oleh situasi darurat
10. Memperkuat upaya masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak anak.

1.1 Mengapa mengikutsertakan Hak Anak?

Bagi banyak perusahaan, anak-anak merupakan kelompok *stakeholder* prioritas. Pada saat yang sama, mereka seringkali menjadi populasi yang paling rentan, memerlukan perhatian khusus untuk menjamin penghormatan terhadap hak mereka. '*Guiding Principles on Business and Human Rights*' menyediakan kerangka yang luas bagi perusahaan untuk

2 Lihat www.unicef.org/crc untuk teks Konvensi dalam Bahasa Arab, Inggris, Perancis dan Spanyol

3 Untuk dapat mengakses Konvensi ILO ini, lihat: www.ilo.org/ipecc/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang-en/index.htm.

mengoperasionalisasi penghormatan mereka terhadap HAM, dan menyerukan kepada seluruh perusahaan untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok atau populasi yang bisa jadi lebih rentan atau termarginalisasi.

Bisa jadi aktivitas bisnis tidak berdampak bagi orang dewasa, namun mengakibatkan dampak buruk terhadap hak anak. Selain itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang mereka sebabkan secara tidak langsung melalui pemasok, pelanggan dan mitra bisnis mereka yang lain, dan juga dampak langsung dari perusahaan terhadap hak anak.

Anak-anak merupakan pemegang hak dan *stakeholder* karena perusahaan berinteraksi dengan mereka dalam kesehariannya sebagai pekerja, pelanggan dan anggota masyarakat. Meski demikian, anak-anak seringkali tidak diperhatikan dengan benar oleh perusahaan. Penginkorporasian hak anak ke dalam kebijakan dan kode etik perusahaan seringkali terbatas untuk pekerja anak. Akan tetapi dampak perusahaan terhadap hak anak dapat meliputi isu-isu seperti desain produk dan pengiklanan, perilaku pegawai terhadap anak-anak, serta hak anak di rantai nilai dan suplai.

Alasan utama untuk mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan dan kode etik perusahaan

Mengikutsertakan penghormatan dan dukungan hak anak ke dalam strategi dan operasi inti perusahaan dapat memperkuat kebijakan keberlanjutan perusahaan dan juga mempertahankan keuntungan. Menghormati dan mendukung hak anak mengharuskan perusahaan untuk mencegah dampak dan secara aktif melindungi kepentingan anak-anak. Mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan dan kode etik akan penting untuk:

- Mengikutsertakan pertimbangan khusus untuk hak anak di dalam fungsi bisnis dari perusahaan
- Memastikan anak-anak dianggap sebagai *stakeholder* yang setara dan bahwa hak anak dipertimbangkan di dalam program HAM perusahaan yang lebih luas.
- Mengatasi dan memitigasi risiko di area-area yang memiliki dampak potensial terhadap hak anak yang tidak diperhitungkan di dalam program HAM yang lebih luas.
- Memastikan penghormatan dan dukungan terhadap hak anak menjadi bagian dari budaya perusahaan dan menyediakan panduan bagi manajer dan karyawan sehubungan dengan hal-hal yang dapat berdampak terhadap hak anak
- Memperingatkan pemasok, konsumen dan mitra bisnis lainnya mengenai pertimbangan khusus yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari risiko potensial.
- Melakukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal mengenai risiko terbesar yang dimiliki perusahaan terhadap hak anak
- Mempromosikan hak anak di dalam rantai nilai dengan menentukan bagaimana penggunaan produk yang tepat dan tidak tepat untuk pelanggan dan pengguna lainnya guna menjamin penghormatan terhadap hak anak
- Menyediakan perlindungan bagi anak-anak yang berhubungan langsung dengan pegawai akibat pekerjaan mereka.

MEMULAI: MENGIKUTSERTAKAN HAK ANAK KE DALAM KEBIJAKAN DAN KODE ETIK

Bagian 2 menjelaskan bagaimana komitmen untuk menghormati dan mendukung hak anak dapat diintegrasikan ke dalam pernyataan prinsip perusahaan, kode etik atau komitmen dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai perusahaan. Komitmen ini dapat berbentuk pernyataan tunggal atau kebijakan maupun kode etik yang khusus terkait perlindungan anak.

Komitmen kepada hak anak harus menyebutkan ekspektasi bagi personil, pemasok, pelanggan, mitra bisnis dan lainnya yang terhubung langsung dengan operasi, produk dan layanan perusahaan. Hal ini harus tersedia bagi publik, dikomunikasikan secara internal maupun eksternal; menerima persetujuan dari posisi tertinggi di perusahaan; dan diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan dan prosedur yang relevan – termasuk standar bagi rantai suplai, pernyataan etika, dan kebijakan karyawan serta kode etik.

2.1 Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan

Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat membantu perusahaan untuk menguji sejauh mana kebijakan atau komitmennya telah mengintegrasikan hak anak:

- Apakah terdapat komitmen yang dibuat secara gamblang mengenai penghormatan terhadap hak anak dengan mengacu pada Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak dan/atau *Convention on the Rights of the Child*?
- Apakah tanggung jawab untuk menanggapi isu HAM, termasuk hak anak-anak, telah ditugaskan kepada divisi yang relevan di dalam perusahaan – sebagai contoh, tanggung jawab sosial perusahaan, pengadaan, pemasaran, pengembangan produk atau keamanan – dan sudah sejauh mana?
- Apakah perusahaan telah mengintegrasikan pertimbangan hak anak ke dalam proses uji kelayakan perusahaan, seperti penilaian risiko atau dampak dan mekanisme pelaporan?
- Apakah risiko dan peluang yang dimiliki perusahaan sehubungan dengan hak anak, bila bersifat serius, telah dimasukkan ke dalam daftar dampak HAM prioritas dan komitmen kebijakan yang relevan?
- Apakah terdapat kode etik atau mekanisme lainnya yang menetapkan secara gamblang mengenai perilaku yang diharapkan dari personil, pemasok, pelanggan dan mitra bisnis lainnya?

2.2 Proses untuk Mengintegrasikan hak anak

Tidak ada proses yang linier untuk mengintegrasikan hak anak ke dalam kerangka kebijakan perusahaan, namun poin-poin berikut dapat membantu perusahaan untuk memulai:

- Libatkan *stakeholder* internal dan eksternal di dalam proses untuk mengintegrasikan pertimbangan terkait hak-hak anak
- Prioritaskan isu serius yang merepresentasikan area risiko dan peluang terbesar untuk mempengaruhi hak anak. Perusahaan juga harus bekerja dengan pemasok, pelanggan dan mitra bisnis untuk mengidentifikasi risiko potensial mereka terhadap anak-anak yang mungkin berbeda dari operasional perusahaan secara langsung.

- Petakan kebijakan dan kode etik yang ada untuk mengidentifikasi cakupannya terhadap isu hak anak yang diprioritaskan perusahaan dan dimana yang masih terdapat kesenjangan (sebagai contoh, kebijakan dan kode etik mengenai HAM, kesehatan dan keselamatan, privasi, pemasaran, pemasok, pengadaan dan etika).
- Memperoleh komitmen dari pejabat senior, menetapkan tanggung jawab manajemen senior, dan alokasikan tanggung jawab serta sumber daya untuk mengatasi isu-isu berkaitan dengan anak-anak kepada fungsi didalam perusahaan yang relevan.
- Pastikan efektifitas dengan cara menanamkan kebijakan hak anak ke dalam prosedur dan kebudayaan perusahaan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang relevan, insentif kepemimpinan dan struktur akuntabilitas, dan juga yang berkaitan dengan relasi bisnis seperti kontrak pemasok kemudian temukan dimana masih terdapat kesenjangan (sebagai contoh, kebijakan dan kode etik mengenai HAM, kesehatan dan keselamatan, privasi, pemasaran, pemasok, pengadaan dan etika).

Sumber-sumber untuk persiapan atau peninjauan kebijakan dan kode etik

UNICEF, 'Children's Rights in Impact Assessments' Panduan dan kriteria praktis bagi perusahaan untuk mengkaji dampak mereka terhadap hak anak. Tersedia di www.unicef.org/csr/156.htm

United Nations Global Compact Office dan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 'A Guide for Business: How to develop a human rights policy,' 2011 Tersedia di www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Tools.aspx

ELEMEN-ELEMEN HAK ANAK DI DALAM KEBIJAKAN DAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Bagian 3 menyediakan panduan mengenai bagaimana hak anak dapat diinkorporasikan ke dalam kebijakan dan kode etik yang sudah ada. Bab ini menyoroti elemen-elemen yang relevan bagi setiap perusahaan – berdasarkan Prinsip no. 1 – terlepas dari industri dan lingkungan operasional-nya.

Prinsip no. 2-10 dapat dipertimbangkan dalam konteks spesifik dari perusahaan, sektor bisnis dan lingkungan setempat.

Bergantung pada dampak perusahaan terhadap anak, elemen-elemen yang terdaftar untuk setiap prinsip dapat dirancang dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan kode etik perusahaan yang relevan. Kriteria untuk memprioritaskan elemen-elemen ini secara efektif adalah:

1. Untuk penghormatan terhadap hak anak – evaluasi tingkat keparahan dari dampak yang dapat merugikan anak-anak sebagai pemegang hak, meliputi tingkat kedaruratan dari dampak, jumlah anak-anak yang terdampak dan apakah dampak tersebut dapat ditanggulangi. 'Keparahan' didefinisikan berdasarkan ukuran, lingkup dan apakah suatu dampak dapat ditanggulangi; hal ini tidak dimaksudkan sebagai konsep yang absolut, melainkan relatif terhadap dampak HAM yang telah diidentifikasi perusahaan.⁴
2. Untuk dukungan terhadap hak anak – penilaian peluang untuk memajukan hak anak, yang sejajar dengan kompetensi perusahaan, seperti produk, layanan dan pengaruh.

3.1 Elemen-elemen umum dari hak anak untuk seluruh perusahaan (Prinsip no. 1)

Bagian 3.1 merekomendasikan elemen keseluruhan yang relevan bagi seluruh perusahaan di setiap sektor, berdasarkan pada Prinsip no. 1.

Prinsip no. 1: Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak anak dan berkomitmen untuk mendukung hak asasi anak

Seluruh perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengintegrasikan elemen-elemen utama ini ke dalam kebijakan dan kode etik HAM yang sudah ada yang relevan.

Pada upaya minimal, perusahaan harus mengikutsertakan:

- Komitmen secara tertulis, menyeluruh dan jelas untuk menghormati seluruh hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak.
- Mendefinisikan hak anak sebagaimana ditetapkan dalam *Convention on the Rights of the Child*, dan/atau mengacu pada Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak sebagai kerangka operasionalisasi bagi perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menghormati dan berkomitmen mendukung hak anak.
- Memprioritaskan isu hak anak, baik yang bersifat perburuhan maupun non-perburuhan, sebagai isu yang memiliki dampak serius bagi anak-anak, untuk diikutsertakan dalam kebijakan perusahaan guna menetapkan ekspektasi bagi karyawan, pemasok, subkontraktor, pelanggan dan mitra bisnis lainnya.

⁴ Definisi 'keparahan' ini dibuat berdasarkan deskripsi 'prinsip-prinsip fundamental' no. 14 dan 24 dari *Guiding Principles on Business and Human Rights* (United Nations, 2011).

- Menetapkan isu hak anak, baik yang bersifat perburuhan maupun non-perburuhan, sebagai isu yang memiliki dampak serius bagi anak sebagai pemegang hak, di dalam kode etik untuk karyawan, pemasok dan lainnya yang mana akan bergantung pada sifat perusahaan dan area operasionalnya serta dampaknya secara spesifik terhadap anak-anak.

Perusahaan juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Komitmen untuk mendukung kemajuan hak anak secara khusus melalui penerapan kompetensi inti dan/atau pengaruh dengan mitra bisnis dan *stakeholder* utama lainnya.

IKEA: Referensi kepada Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak

"Berpegang pada keyakinan kami bahwa tindakan kami harus selalu memperhatikan kepentingan anak-anak, kami akan menggunakan Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak untuk memperkuat kinerja kami di seluruh bisnis kami untuk melindungi hak anak-anak"

- 'People & Planet Positive: Ikea Group Sustainability Strategy for 2020', 2012

Kuoni: Memprioritaskan hak asasi manusia di industri travel dan pariwisata

"Kuoni tidak membanding-bandingkan pentingnya satu hak dan hak lain. Akan tetapi, kami berupaya untuk memprioritaskan upaya implementasi terkait keparahan dampak buruk yang mempengaruhi para pemegang hak dan peluang untuk memajukan hak asasi manusia yang sesuai dengan kompetensi inti kami. Analisis konteks secara akurat merupakan kunci dari aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan HAM. Secara khusus, Kuoni berkomitmen kepada hal-hal berikut:

- *Kuoni menghormati dan memupuk hak asasi manusia yang berkaitan dengan pekerja, termasuk non-diskriminasi, keselamatan & kesehatan serta upah layak, di dalam operasi Kuoni dan rantai suplai pariwisata-nya.*
- *Kuoni menghormati dan mendukung hak anak, termasuk perlindungan dari eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan remaja di sektor pariwisata, perlindungan dari pekerja anak dan perdagangan orang.*
- *Kuoni melaksanakan uji kelayakan sehubungan dengan hak asasi manusia dan bisnis kami di destinasi sensitif dan mempromosikan praktik terbaik."*

-Kuoni, 'Pernyataan Komitmen terhadap Hak Asasi Manusia', 2012

3.2 Elemen spesifik dari hak anak berdasarkan Prinsip No. 2-10

Setiap perusahaan akan memprioritaskan area fokus untuk hak-hak anak berdasarkan penilaian dampaknya, tingkat 'materialitas' dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Penerapan Prinsip 2–10 karenanya harus dipertimbangkan dalam konteks perusahaan, sektor bisnis dan lingkungan lokal.

Bagian berikut menguraikan unsur-unsur untuk disertakan dalam kebijakan dan kode etik perusahaan, yang diatur sesuai dengan area cakupan dalam Prinsip 2–10. Karena pendekatan bisnis terhadap kebijakan dan kode etik bervariasi, elemen-elemen ini harus disesuaikan dengan konteks spesifik perusahaan.

Prinsip no. 2: Berkontribusi terhadap penghapusan pekerja anak, termasuk di seluruh aktivitas bisnis dan relasi bisnis

Bagian mengenai pekerja anak ini perlu diperhatikan oleh perusahaan yang beroperasi di konteks yang memiliki karakteristik atas faktor-faktor di bawah. Sumber eksternal juga diberikan di lampiran bila tersedia sumber data yang komprehensif dari negara.

- Usia kelulusan sekolah tidak sama dengan usia diperbolehkan kerja
- Terdapat risiko tinggi atau insiden keberadaan pekerja anak di area perusahaan beroperasi, negara atau kawasan regionalJumlah pekerja migran yang tinggi
- Ketersediaan sekolah yang rendah, kualitas sekolah yang rendah, dan tingkat penerimaan sekolah serta kelulusan yang rendah
- Kemiskinan
- Prevalensi ekonomi informal
- Sistem, kebijakan dan institusi hukum yang lemah
- Biaya pekerja
- Rasio modal-pekerja yang rendah

Elemen-elemen penghormatan untuk kebijakan atau kode etik:

- Kutip secara gamblang Konvensi ILO no. 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan kerja dan no. 182 tentang pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Ikutsertakan definisi dan persyaratan terkait 'pekerja anak' – bahwa usia minimum bagi setiap pekerja adalah 15 atau usia minimum kelulusan sekolah, manapun yang lebih tua. Dalam sejumlah kasus, pengecualian dapat dibuat untuk negara dengan ekonomi dan sistem pendidikan yang rendah, sehingga ditentukan bahwa usia minimum adalah 14 berdasarkan konsultasi antara pemerintah dengan pemberi kerja dan organisasi pekerja.
- Sebutkan dengan jelas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang sesuai dengan hukum nasional atau standar internasional (manapun yang lebih tua). Bila diizinkan oleh hukum nasional, perusahaan, atau pemasok atau subkontraktor, dapat mempekerjakan anak berusia 13-15 (bila usia kerja minimum adalah 15) dan antara 12 dan 13 (bila usia kerja minimum adalah 14) untuk mengerjakan hal-hal yang ringan selama beberapa jam per hari. 'Pekerjaan ringan' harus berupa pekerjaan yang sederhana dan terbatas yang diawasi dengan memadai oleh orang dewasa – dan tidak boleh mengganggu peluang anak-anak mendapatkan pendidikan. Secara spesifik, bila diizinkan oleh hukum nasional, pekerjaan ringan dapat diberikan kepada anak berusia 12 sampai 13 tahun (bila usia minimum adalah 14) atau 13-14 tahun (bila usia minimum adalah 15).
- Larang penggunaan pekerja di bawah umur oleh pemasok dan subkontraktor mereka – dan buatlah tindakan-tindakan untuk memantau dan memitigasi seandainya terjadi pelanggaran. Bila pemasok menyadari bahwa mereka menggunakan pekerja anak ilegal, mereka harus memastikan agar anak-anak yang terdampak didaftarkan untuk program ganti rugi, ketimbang diberhentikan begitu saja dari pekerjaan mereka.

Elemen-elemen pendukung untuk kebijakan atau kode etik:

Berkomitmen untuk mendukung program dan inisiatif yang berkontribusi terhadap penghapusan pekerja anak. Ini bisa berupa dukungan terhadap struktur perlindungan sosial yang membantu keluarga untuk menghasilkan pemasukan dan inisiatif untuk upah layak bagi pekerja yang memungkinkan keluarga untuk bertahan hidup tanpa harus bergantung pada pekerja anak.

Jelaskan komitmen perusahaan untuk bekerja dengan pemerintah, mitra dan lain-lain dalam mempromosikan pendidikan dan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan dari pekerja anak. Ini dapat berupa bantuan mengangkat orang-orang dari kemiskinan atau mengupayakan isu anak-anak tanpa rumah.

Produk Paling Laku: Kebijakan pekerja anak untuk perusahaan pakaian dan aksesoris

“Tidak ada anak-anak dengan usia di bawah 15 tahun yang diperoleh untuk bekerja di pabrik yang memproduksi produk Bestseller. Bila hukum menyatakan usia yang lebih tinggi, maka hukum tersebut harus diikuti. Pemasok harus memiliki sistem manajemen yang memadai untuk memastikan tidak ada anak-anak yang dipekerjakan. pekerja muda di bawah usia 18 tahun hanya boleh mengerjakan pekerjaan ringan di pabrik dan seluruh hukum mengenai perlakuan pekerja muda harus diikuti.

Penggunaan pekerja anak tidak akan dapat diterima dan kami tidak akan bekerja dengan pemasok yang menggunakan pekerjaan anak di fasilitas mereka, atau pemasok yang tidak memiliki sistem yang efisien untuk memastikan tidak ada pekerja anak yang berada di lingkungan produksi mereka. Pemasok harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa subkontraktor tidak terlibat dalam mempekerjakan pekerja anak, dan bahwa pekerja muda tidak dilibatkan dalam pekerjaan berbahaya atau pekerjaan dalam kondisi yang sulit.

Bila pekerja anak ditemukan di pabrik, maka tindakan-tindakan berikut harus dilakukan:

1. Anak tersebut harus dikeluarkan dari tempat kerja dan diberikan alternatif yang memungkinkan. Intervensi darurat untuk pekerja anak ini harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, dan memastikan bahwa anak tersebut tidak dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih buruk.
2. Dalam berkomunikasi dengan anak dan juga keluarga atau wali mereka, maka opsi pendidikan yang tepat harus diberikan bagi anak tersebut – setidaknya sampai mereka tidak lagi berada di rentang usia wajib sekolah.
3. Pemasok tetap bertanggung jawab untuk memberikan upah bagi sang anak setelah ia dikeluarkan dari tempat kerja sampai ia mencapai usia yang tidak lagi diwajibkan untuk bersekolah.
4. Pemasok diharuskan untuk segera menawarkan posisi bagi anggota keluarga atau wali dari sang anak dengan upah bagi orang dewasa. Anak-anak harus mendapatkan opsi untuk bekerja di pabrik begitu ia telah mencapai usia yang diperbolehkan untuk bekerja.”

Kebijakan Pekerja Anak Bestseller, ‘Kebijakan Pekerja Anak: Bagian dari Kode Etik Bestseller’, 2011

Sumber-sumber untuk mengembangkan kebijakan dan kode etik mengenai pekerja anak

International Labour Organization, ‘Eliminating Child Labour Guides for Employers: Guide Two – How employers can eliminate child labour’ memberikan masukan untuk menginkorporasikan pekerja anak di dalam kebijakan perusahaan – PDF dapat diakses di www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_117865.pdf

ILO Helpdesk for Business on International Labour Standards: Sumber bagi manajer perusahaan dan pekerja mengenai cara untuk menyejajarkan operasi perusahaan dengan standar perburuhan internasional dan membangun hubungan industri yang baik – www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm

Child Labour Platform, ‘Report 2010–2011: Business practices and lessons learned on addressing child labour’ Menawarkan informasi mengenai proses uji kelayakan, termasuk bab yang menerangkan tentang pembuatan pernyataan kebijakan mengenai pekerja anak – PDF tersedia di www.aidenvironment.org/media/uploads/documents/Child_Labour_Platform_Report_2010-11.pdf

Global Compact, ‘Human Rights and Business Dilemmas Forum: Child labour’ Menyediakan latar belakang dan analisis termasuk contoh dan studi kasus – <http://human-rights.unglobalcompact.org/dilemmas/child-labour/#.Ugpl5VPFZox>

Prinsip no. 3: Menyediakan pekerjaan layak bagi pekerja muda, orangtua dan wali

Bagian mengenai pekerjaan layak ini, terutama yang berhubungan dengan pekerja muda⁵ dan keluarga, harus diperhatikan baik-baik oleh perusahaan yang beroperasi di konteks yang dicirikan oleh faktor-faktor di bawah.

- Jumlah pekerja muda yang tinggi
- Jumlah pekerja migran yang tinggi
- Kemiskinan
- Keberadaan program magang bagi siswa yang bersifat wajib dan masif yang digunakan untuk menutupi kekurangan pekerja
- Kurangnya penghormatan terhadap kebebasan berserikat dan negosiasi kolektif
- Prevalensi ekonomi informal

Elemen-elemen penghormatan untuk kebijakan atau kode etik:

Larang pengangkatan pekerja muda (di bawah 18 tahun) untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral mereka. Kutip secara gamblang Konvensi ILO no. 182 mengenai penghapusan pekerjaan berbahaya dan tentukan jenis pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pekerja muda. Bila pekerja

5 ‘Pekerja muda’ sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah anak-anak dengan usia di atas usia yang diperbolehkan hukum untuk bekerja dan di bawah 18 tahun. Usia minimum yang diakui di tingkat internasional untuk diperbolehkan bekerja penuh-waktu dengan pekerjaan non-bahaya adalah 15 tahun, namun standar nasional bisa jadi lebih tinggi. Mengacu pada Konvensi ILO no. 138 mengenai usia minimum, negara dengan sistem ekonomi dan pendidikan yang kurang berkembang dapat membuat ketentuan sementara untuk mengatur usia minimum sebagai 14 tahun.

Pekerja muda dapat dilibatkan dalam pekerjaan yang spesifik berdasarkan ketentuan Konvensi ILO no. 138. Hal ini meliputi pekerjaan ringan bersama pendidikan bagi anak berusia 13, atau 12 bilamana undang-undang nasional mengizinkan berdasarkan usia minimum 14 tahun untuk program magang dan program transisi sejenis yang memungkinkan anak-anak bertransisi dari pendidikan ke pekerjaan penuh-waktu.

Pekerjaan berbahaya atau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak lainnya, sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi ILO no. 182, tidak diperbolehkan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun, walaupun hukum menyatakan mereka legal untuk bekerja.

muda terpapar pada kondisi pekerjaan berbahaya, mereka harus ditawarkan alternatif yang sesuai seperti dipindahkan ke pekerjaan yang lebih ringan di lingkungan kerja yang lebih aman.

Buat kebijakan kerjasama dengan pemasok yang berfokus pada peningkatan kapasitas, dukungan dan perbaikan yang berkelanjutan. Jelaskan komitmen untuk meningkatkan kapasitas perusahaan lokal agar mampu mengelola isu hak anak secara proaktif atau memberdayakan pekerja untuk melindungi hak mereka di tempat kerja dan bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Tetapkan kondisi kerja layak bagi pekerja muda dan pekerja pelajar, dan juga orangtua serta wali. Nyatakan untuk tidak mentolerir kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja muda, dan tempatkan upaya untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan.

Sediakan perlindungan dari pemberhentian dan larang diskriminasi terhadap pekerja sehubungan dengan hak maternitas mereka dan terhadap pekerja yang memiliki tanggung jawab bagi keluarganya. Kewajiban terkait elemen ini ditetapkan di dua konvensi ILO: Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, No. 156 dan Perlindungan Maternitas, No. 183 (seluruh konvensi ILO tersedia di www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO::). Elemen-elemen spesifik yang harus diikutsertakan dalam kebijakan perusahaan meliputi:

- Jaminan bahwa perempuan yang hamil atau sedang menyusui tidak akan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berisiko bagi kesehatan ibu atau anaknya dan bahwa cuti hamil berbayar selama tidak kurang dari 14 hari harus diberikan. Ketetapan ini dibuat untuk memastikan agar perempuan yang hamil atau sedang menyusui dapat menjaga kesehatan diri dan anaknya dengan standar kehidupan yang layak.
- Dalam kasus jatuh sakit, komplikasi atau risiko komplikasi akibat kehamilan atau melahirkan, cuti akan diberikan sebelum dan sesudah cuti hamil (ILO 183, Pasal 5).
- Selain itu, ibu yang sedang menyusui akan diberikan istirahat harian sekali atau lebih, atau pengurangan jam kerja harian, untuk menyusui anaknya. Istirahat atau pengurangan jam kerja harian ini dihitung sebagai jam kerja dan harus diupah dengan sepenuhnya (ILO 183, Pasal 10).

Elemen-elemen dukungan untuk kebijakan atau kode etik:

Jelaskan komitmen perusahaan untuk merekrut pekerja muda. Ini dapat membentuk kebijakan perusahaan untuk merekrut pekerja di atas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, khususnya di area dimana terdapat tingkat pengangguran anak muda yang tinggi.

Jelaskan komitmen perusahaan untuk memberikan pekerja muda peluang untuk mengakses pendidikan, pelatihan dan keterampilan hidup. Perusahaan juga dapat membentuk program untuk melibatkan pekerja muda, sebagai contoh, melalui pelatihan dan konsultasi khusus.

Berikan pekerja muda jaminan kesehatan, pemantauan dan perawatan yang memadai (sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO no. 77, Pemeriksaan Medis untuk Pemuda).

Buat syarat-syarat kerja yang ramah-keluarga. Ini meliputi elemen-elemen seperti cuti maternitas dan parental, pengaturan kerja yang fleksibel dan akses terhadap fasilitas perawatan anak.

IKEA: Pengangkatan pekerja muda di industri perabot rumah

"IKEA mendukung perekrutan pekerja muda yang sesuai dengan hukum.

"Pemasok IKEA harus melindungi pekerja muda dengan usia yang diperbolehkan hukum untuk bekerja, sampai mereka mencapai usia 18 tahun, dari segala bentuk pekerjaan yang, bila dilakukan, kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral mereka.

"Pemasok IKEA harus memastikan bahwa pekerja muda diperlakukan sesuai dengan hukum. Ini meliputi upaya untuk menghindari pekerja muda dan sif malam serta memastikan upah minimum.

"Klarifikasi: berdasarkan UN Convention on the Rights of the Child, 1989, IKEA meyakini bahwa pekerja muda memiliki hak untuk bekerja selama persyaratan dari Konvensi Internasional dan hukum setempat dipenuhi."

-IKEA, 'IWAY Standard' (10.2), 2008

Hewlett-Packard: Kebijakan pekerja pelajar untuk perusahaan teknologi

"Seluruh pekerjaan harus berlangsung secara sukarela. Siswa dan pekerja sementara harus dibebaskan untuk meninggalkan pekerjaan kapanpun setelah melakukan pemberitahuan tanpa mendapatkan konsekuensi negatif, dan mereka harus dapat mengakses mekanisme keluhan yang dapat diandalkan dan tidak berpotensi merugikan mereka.

Peraturan setempat harus ditegakkan atau diterapkan dengan lebih baik: Seluruh peraturan mengenai usia kerja, lingkungan kerja, jam kerja dan persyaratan serta batas kontrak untuk pekerja pelajar dan sementara akan ditegakkan. Selain itu, panduan HP membatasi jam kerja pelajar di bawah batasan hukum.

Jumlah pekerja pelajar harus dibatasi: Panduan HP menentukan tingkat jumlah pekerja pelajar yang dapat diterima untuk memastikan agar tenaga kerja langsung dalam fasilitas manufaktur diisi mayoritas oleh pekerja penuh-waktu

Pekerjaan pelajar harus memberikan nilai pendidikan: Pekerja pelajar hanya boleh terlibat dalam aktivitas pekerjaan yang membantu mereka untuk mencapai gelar yang mereka butuhkan."

-Panduan HP untuk Pemasok yang Bertanggung Jawab

Sumber-sumber untuk mengembangkan kebijakan dan kode etik sehubungan dengan kondisi kerja bagi pekerja muda dan pekerja yang memiliki anak

Child Labour Platform, 'Report 2010–2011: Business practices and lessons learned on addressing child labour' Memberikan informasi mengenai proses uji kelayakan, terdapat bab khusus mengenai pembentukan pernyataan kebijakan terkait pekerja anak – PDF tersedia di www.aidenvironment.org/news/child-labour-platform-presents-business-practices-2010-11.pdf

International Labour Organization, 'Workplace Solutions for Childcare' Menggunakan pendekatan praktis untuk memberikan perawatan anak, termasuk inisiatif yang ditemukan di 10 negara berbeda – PDF tersedia di www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_110397/lang--en/index.htm

ILO, 'A Training Package on Work and Family' Menjelaskan inisiatif pekerjaan dan keluarga yang dapat diintegrasikan dan kompatibel dengan manajemen perusahaan yang produktif dan kompetitif – www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/WCMS_TRAVAIL_PUB_58/lang--en/index.htm

'ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work' www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm

Prinsip no. 4: Memastikan perlindungan dan keselamatan anak-anak di seluruh aktivitas dan fasilitas perusahaan

Bagian ini akan relevan untuk setiap sektor bisnis di seluruh konteks operasional karena berkaitan dengan tanggung jawab untuk mengatasi risiko terhadap anak-anak yang dimunculkan oleh fasilitas dan pegawai perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Prinsip ini memberikan panduan bagi perusahaan ketika mempertimbangkan kebijakan khusus atau kode etik untuk melindungi anak-anak.

Elemen-elemen penghormatan untuk kebijakan atau kode etik

Tidak mentolerir kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, tidak terbatas pada eksploitasi seksual

Melarang penggunaan fasilitas perusahaan, kartu kredit dan rekening perusahaan untuk pembelian foto-foto eksploitasi anak di internet atau mengkonsumsi kegiatan seks komersil di industri pariwisata ketika sedang bepergian

Menerapkan kebijakan dan/atau kode etik perlindungan anak. Bila relevan, perusahaan harus meminta pemasok dan mitra bisnisnya untuk mengadopsi elemen-elemen yang sama di dalam kode etik mereka sebagai prasyarat untuk melakukan bisnis.

Apa bentuk kebijakan atau kode etik perlindungan anak?

'Perlindungan anak' merupakan istilah luas yang menjelaskan kebijakan, standar, panduan dan prosedur untuk melindungi anak-anak. Hal ini bertujuan untuk mencegah, menanggapi dan menanggulangi eksploitasi, pengabaian, dan kekerasan yang dialami oleh anak-anak di seluruh situasi.

Kebijakan perlindungan anak harus mendemonstrasikan posisi perusahaan dan menyediakan informasi mengenai cara-cara untuk melindungi anak-anak. Ini meliputi situasi dimana pegawai berhubungan langsung dengan anak-anak melalui aktivitas perusahaan dan bila terdapat dampak tidak langsung kepada anak-anak melalui produk atau relasi bisnis, contohnya aktivitas daring di tempat kerja dan perilaku pelanggan di destinasi wisata.

Kode etik perlindungan anak harus menyatakan ekspektasi perusahaan terhadap pegawai, pemasok dan mitra bisnis lainnya untuk menghormati hak anak.

Kapan perusahaan perlu mempertimbangkan pengembangan kebijakan atau kode etik perlindungan anak?

Secara umum, menginkorporasikan hak anak yang relevan ke dalam pernyataan HAM, kebijakan dan kode etik perusahaan merupakan hal yang baik. Akan tetapi, bila risiko dampak negatif terhadap anak-anak cukup tinggi, perusahaan dapat mempertimbangkan penerapan kebijakan atau kode etik khusus untuk melindungi anak-anak. Faktor risiko potensial antara lain:

- Perusahaan, atau pemasok dan subkontraktor-nya, menyediakan layanan langsung bagi anak-anak, contohnya fasilitas olahraga, pendidikan dan perawatan anak.
- Pegawai berhubungan langsung dengan anak-anak melalui aktivitas perusahaan seperti proyek filantropi dan tanggung jawab sosial.
- Perusahaan menjual produk yang dikonsumsi oleh anak-anak, seperti ritel yang memiliki lokasi fisik dan penyedia layanan daring.
- Perusahaan, atau pemasok dan subkontraktor-nya, bermarkas di area dimana eksploitasi anak – seperti prostitusi anak – cukup prevalen. Area yang dimaksud juga meliputi area yang terdampak oleh bencana alam atau konflik bersenjata.
- Klien perusahaan memiliki risiko untuk mengeksploitasi anak-anak, contohnya industri travel dan pariwisata atau penyedia layanan internet.

Elemen-elemen apa saja yang perlu diikutsertakan dalam kebijakan atau kode etik perlindungan anak?

Tabel berikut mengidentifikasi area dengan dampak potensial dan elemen-elemen terkait yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan kode etik perlindungan anak. Contoh-contoh ini dapat dirancang sebagai persyaratan untuk pegawai, pemasok, pelanggan dan mitra bisnis yang lain.

Area dengan Dampak potensial	Elemen-elemen PERLINDUNGAN ANAK di dalam kebijakan atau kode etik
Perekrutan pekerja muda	• Melarang perekrutan pekerja muda (di bawah 18 tahun) untuk melakukan jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral mereka • Tidak mentolerir kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja muda, dan menempatkan mekanisme untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan
Berhubungan langsung dengan anak, seperti: Fasilitas perawatan anak Aktivitas bersama anak-anak Menjual produk langsung ke anak-anak	• Jelaskan bagaimana perusahaan merekrut pegawai yang bekerja dengan anak-anak • Pelatihan untuk pegawai baru dalam menjaga keamanan anak-anak • Seluruh pegawai yang bekerja dengan anak-anak memiliki kualifikasi sesuai standar yang diakui dan menerima pelatihan secara reguler dan berkelanjutan • Tetapkan segala prosedur untuk aktivitas yang berhubungan langsung dengan anak-anak dan pemuda, mis. anak-anak tidak boleh tidak diawasi, mereka diajak berkonsultasi dan dihormati, dan mereka diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi • Seluruh informasi mengenai anak-anak dijaga kerahasiaannya

Eksplorasi, meliputi eksploitasi seksual terhadap anak-anak oleh pegawai, pelanggan dan mitra bisnis lainnya	• Tidak mentolerir kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak, termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual. Sebutkan rincian seperlunya, mis. prostitusi anak, foto eksploitasi anak • Nyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran akan ditanggapi dengan serius dan diselidiki. Pelanggaran yang serius akan dilaporkan kepada pihak berwenang. • Aturan ini berlaku selama jam kerja dan di luar jam kerja
Penyalahgunaan fasilitas dan keuangan perusahaan oleh personil seperti: Eksplorasi seksual Pornografi anak Penyalahgunaan bangunan atau kendaraan perusahaan	• Larang penggunaan fasilitas perusahaan, kartu kredit dan rekening perusahaan untuk membeli foto-foto eksploitasi anak di internet atau membayar layanan seks komersil ketika bepergian • Keuangan atau pengeluaran perusahaan tidak boleh digunakan dalam kegiatan yang melibatkan eksploitasi anak • Komputer tidak boleh digunakan untuk mengunduh atau melihat pornografi anak • Kendaraan tidak boleh digunakan untuk mengantarkan anak-anak kecuali diizinkan
Penyalahgunaan produk dan layanan	• Jelaskan upaya perusahaan untuk memitigasi segala penyalahgunaan produk atau layanan yang merugikan anak-anak • Buat persyaratan dan/atau kebijakan tepat guna yang menyatakan secara gamblang posisi perusahaan mengenai penyalahgunaan produk atau layanannya yang dapat mengeksploitasi anak-anak.

Sime Darby: Kebijakan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di perusahaan multinasional yang beragam

“Sime Darby Berhad merupakan perusahaan bertanggung jawab yang mengadvokasikan keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh anak-anak. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Kebijakan Perlindungan Anak Pemerintah Malaysia dan mendukung konvensi internasional maupun lokal yang menuntut agar anak-anak menerima perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Sime Darby Berhad menegakkan hak anak-anak dan tidak akan ragu-ragu untuk memastikan agar lingkungan yang baik bagi anak-anak dapat diciptakan di lingkup organisasi dan operasi-nya.”

- Sime Darby, 'Corporate Child Protection Policy Statement'

TUI Travel Group: Menanggapi eksploitasi anak di rantai nilai

“TUI Travel berkomitmen terhadap perlindungan anak – baik mereka yang kami layani untuk berlibur maupun mereka yang berada di destinasi. Kami mengutuk eksploitasi terhadap anak-anak, sebuah pelanggaran fundamental terhadap hak asasi dan martabat anak-anak, dan kami berhak untuk menghentikan hubungan bisnis dengan siapapun atau perusahaan manapun yang melakukan atau terlibat dengan segala bentuk eksploitasi. Bisnis travel dan pariwisata memiliki peran penting dalam melindungi hak anak.”

- TUI Travel PLC, 'Child Protection Policy'

Abatovy: Tidak mentolerir eksploitasi anak di industri tambang

“Untuk mengatasi isu seperti prostitusi dan eksploitasi anak, Ambatovy telah menerapkan Kode Etik untuk tidak mentolerir seluruh pekerjaannya yang terlibat dalam isu seperti, namun tidak terbatas pada, eksploitasi anak. Kode etik ini bersifat wajib bagi seluruh pegawai nasional dan ekspatriat. Seluruh kontraktor akan memiliki klausula ini sebagai klausula tambahan. Sebuah gugus tugas telah dibentuk untuk memantau penerapan kebijakan ini, yang meliputi pelaporan spesifik dan mekanisme pengaduan (whistle-blowing). Segala bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi.”

- Ambatovy, 'Child Protection: Zero-tolerance policy'

Prinsip 5: Memastikan bahwa produk dan layanan sudah aman, dan berupaya untuk mendukung hak anak melaluinya

Bagian ini perlu diperhatikan oleh perusahaan yang beroperasi dalam konteks yang dicirikan oleh faktor-faktor berikut:

- Anak-anak merupakan konsumen dari produk atau layanan perusahaan, atau mereka terpapar secara tidak langsung ke produk dan layanan ini.
- Anak-anak terlibat dalam pengujian produk perusahaan
- Produk atau layanan memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian mental, moral atau fisik bagi anak-anak atau produk dan layanan dapat digunakan, atau digunakan, untuk bentuk-bentuk penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi anak, contohnya produk dan layanan memfasilitasi eksploitasi seksual anak, menarget korban anak atau menampilkan foto eksploitasi anak.
- Produk atau layanan tidak tersedia atau dapat diakses oleh anak-anak yang kurang beruntung atau termarginalisasi.

Elemen-elemen penghormatan untuk kebijakan atau kode etik:

Jelaskan bagaimana kebijakan perusahaan sesuai dengan undang-undang nasional yang relevan. Bila tidak terdapat kerangka hukum yang memadai, maka nyatakan komitmen terhadap standar internasional dan industri mengenai keselamatan dan kualitas.

Buat panduan yang jelas mengenai segala bentuk pengujian yang melibatkan anak-anak. Jelaskan proses penjaminan kualitas terhadap pengujian dan keamanan produk.

Terangkan batasan usia untuk penggunaan produk dan persyaratan usia untuk pengawasan orang dewasa. Ini meliputi penjelasan mengenai cara yang tepat bagi konsumen untuk menggunakan produk dan cara untuk melindungi anak-anak dari kerugian, sekaligus juga memberikan peringatan akan risiko terhadap keselamatan anak-anak.

Lindungi hak anak-anak untuk mendapatkan kerahasiaan dan larang penyebaran data pribadi tanpa seizin orangtua.

Jelaskan bagaimana pelanggan dan masyarakat umum dapat melaporkan keluhan kepada perusahaan, dan nyatakan komitmen untuk mengungkapkan dan menanggulangi segala risiko kesehatan yang terdeteksi.

Jelaskan bagaimana upaya perusahaan untuk memitigasi segala bentuk penyalahgunaan produk atau layanan yang dapat merugikan anak-anak. Buat persyaratan tepat guna untuk menyatakan posisi perusahaan secara gamblang mengenai penyalahgunaan produk atau layanannya yang dapat mengeksploitasi anak-anak.

Elemen-elemen dukungan untuk kebijakan atau kode etik:

Komitmen untuk menggunakan kompetensi inti dan relasi perusahaan untuk mempromosikan akses yang lebih luas terhadap produk atau layanan yang esensial bagi keselamatan dan pertumbuhan anak; promosikan akses yang setara; serta dukung gaya hidup dan perilaku yang positif.

Microsoft: Memitigasi risiko dari teknologi

Sebagai inovator dan penyedia dari teknologi termutakhir, Microsoft memiliki peluang untuk bermitra dengan agensi penegak hukum di seluruh dunia guna membantu memastikan dan melindungi keselamatan serta hak asasi pengguna internet. Unit Kejahatan Digital Microsoft telah bekerja untuk memastikan penggunaan internet yang aman melalui penegakkan hukum yang kuat, kemitraan global dan kebijakan serta teknologi. Salah satu prioritas dari unit adalah memberantas perdagangan orang, melindungi keamanan anak-anak di dunia maya, dan melawan pornografi anak serta eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

- Microsoft "Global Human Rights Statement"

Sumber-sumber untuk mengembangkan kebijakan dan kode etik terkait produk dan layanan

International Telecommunications Union (ITU), 'Guidelines for Industry on Child Online Protection' Dibuat melalui kolaborasi antara ITU, UNICEF dan kontributor yang aktif dalam isu perlindungan anak di dunia maya. Panduan ini memberikan nasehat kepada perusahaan mengenai kebijakan dan standar dalam melindungi anak-anak di dunia maya dan mempromosikan akses yang lebih aman bagi anak-anak ke internet – PDF berbahasa Inggris dapat diakses di:

www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/guidelines/industry/industry.pdf;

Child Online Protection Guidelines, tersedia dalam berbagai bahasa di:

www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop

Prinsip 6: Penggunaan strategi pemasaran dan pengiklanan yang menghormati dan mendukung hak anak

Bagian ini perlu diperhatikan oleh perusahaan beroperasi dalam konteks yang dicirikan oleh faktor-faktor berikut:

- Anak-anak merupakan konsumen dari produk dan layanan yang diiklankan
- Anak-anak ditampilkan dalam iklan produk dan layanan
- Terdapat kekurangan regulasi yang mengatur standar mengenai hak anak dan kurangnya kesadaran akan kebutuhan mereka
- Jejaring media sosial digunakan secara masif dalam pemasaran yang ditujukan pada anak-anak dan pemuda.

Elemen-elemen penghormatan untuk kebijakan atau kode etik:

Mengaculah ke peraturan nasional dan kode etik industri mengenai pemasaran ke anak-anak dan jelaskan bagaimana kebijakan perusahaan mematuhi atau sesuai dengan peraturan dan kode etik ini (sebagai contoh, kepatuhan terhadap rekomendasi World Health Organization mengenai pemasaran makanan dan minuman).

Jelaskan komitmen perusahaan terhadap pemasaran dan pelabelan produk yang bertanggung jawab yang dapat memastikan agar orangtua dan anak-anak mampu membuat keputusan yang benar. Ini meliputi pernyataan terkait usia minimum untuk anak-anak yang menjadi target iklan dan standar untuk konten yang layak dalam segala bentuk pemasaran, termasuk promosi yang spesifik di lokasi tertentu.

Pengumpulan dan penggunaan data harus dinyatakan dalam pernyataan kebijakan yang jelas dan dipastikan mendapat persetujuan. Hal ini meliputi segala informasi yang dikumpulkan dari anak, termasuk foto, yang digunakan atau disimpan oleh perusahaan.

Komitmen untuk pemanfaatan yang benar ketika menjadikan anak-anak sebagai 'brand ambassador' dan ketika melakukan pemasaran peer-to-peer. Ini akan meliputi representasi anak yang usianya sesuai di seluruh platform media; pencegahan seksualisasi anak-anak dan pemuda; serta melawan diskriminasi.

Elemen-elemen dukungan untuk kebijakan atau kode etik:

Komitmen untuk mengembangkan dan menyebarluaskan informasi, pesan dan iklan kepada anak-anak dan orangtua terkait promosi kebiasaan yang sehat. Pesan-pesan ini dapat berupa gizi, bermain, perilaku, penghargaan terhadap diri sendiri, melawan kekerasan dan keberagaman.

H&M: Kebijakan pengiklanan untuk melindungi anak-anak dalam ritel pakaian

“Gambar-gambar untuk iklan H&M tidak dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sebuah ide khusus, melainkan berbagai gaya hidup dan perilaku. ... H&M memiliki panduan khusus untuk pengiklanan konsep pakaian bagi anak-anak. Target audiensnya adalah orangtua, bukan anak-anak, sehingga kami menempatkan iklan kami di media yang tidak dikhususkan untuk anak-anak. Anak-anak yang menjadi bagian dari kampanye kami melakukannya berdasarkan keputusan mereka sendiri. Bila seorang anak dipilih untuk melakukan sesi foto, maka akan selalu ada perwakilan H&M yang mengawasi dan memastikan keselamatan anak-anak guna mempertahankan lingkungan profesional.”

- H&M, Kebijakan HAM

Sumber-sumber untuk mengembangkan kebijakan dan kode etik pengiklanan dan pemasaran

International Chamber of Commerce, ‘ICC Consolidated Code of Advertising and Marketing Communications Practice’ Panduan ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan ICC Marketing Code dan kerangka pengawasan yang serupa – PDF tersedia di: [www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/Advertising-and-Marketing-Communication-Practice-\(Consolidated-ICC-Code\)](http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/Advertising-and-Marketing-Communication-Practice-(Consolidated-ICC-Code))

Advertising Association and Turner Media Innovations, ‘Check’ (Children’s Ethical Communications Kit) Sumber daring ini berisi aturan, undang-undang dan panduan mengenai pemasaran dan komunikasi ke anak-anak dan pemuda - <http://check.uk.com>

Prinsip 7: Menghormati dan mendukung hak anak sehubungan dengan lingkungan dan akuisisi serta penggunaan tanah

Bagian ini perlu diperhatikan oleh perusahaan yang beroperasi di konteks yang dicirikan oleh faktor-faktor berikut:

- Kurangnya pembangunan atau kerangka penegakkan hukum yang memadai untuk mengatasi ancaman lingkungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan penduduk
- Kurangnya pendaftaran tanah
- Banyaknya rumah tangga yang dikepalai oleh anak-anak, contohnya keluarga yang tidak memiliki orangtua di rumah untuk waktu yang lama, atau sudah bersifat permanen, atau dimana anak-anak dirawat oleh anak lain di dalam keluarga
- Area padat penduduk dimana banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan.
- Anak-anak dan keluarganya dipinggirkan atau dipindahkan paksa akibat aktivitas bisnis

Elemen-elemen penghormatan untuk kebijakan atau kode etik

Jelaskan komitmen perusahaan untuk meminimalisir dan memitigasi risiko lingkungan yang dapat berdampak bagi kesehatan anak. Ini dapat meliputi penggunaan air, pembuangan limbah dan pilihan lokasi pabrik. Dalam seluruh kasus tersebut, perusahaan harus menetapkan standar dan target yang memperhatikan kerentanan anak-anak terhadap polusi dan tingkat toksisitas.

Sertakan pernyataan yang jelas mengenai proses untuk akuisisi dan pemanfaatan tanah. Pernyataan ini harus menerangkan komitmen terhadap dan prosedur untuk berkonsultasi

dengan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, dan perempuan dan anak. Selain itu, pernyataan ini harus menjelaskan bagaimana sumberdaya dikelola untuk memastikan anak-anak dan keluarga mereka memiliki akses terhadap sumber daya tersebut, dan bahwa kehidupan serta layanan dasar mereka tidak akan terdampak.

Sediakan pernyataan yang jelas mengenai kebijakan perumahan untuk pekerja dan keluarga mereka yang tinggal di akomodasi perusahaan.

Sumber-sumber untuk mengembangkan kebijakan dan kode etik sehubungan dengan lingkungan dan akuisisi serta penggunaan tanah

International Finance Corporation (World Bank Group), ‘IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. Standar ini menyediakan panduan untuk menghindari, memitigasi dan mengelola risiko serta dampak sebagai bagian dari praktik bisnis yang berkelanjutan – PDF tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol di: www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_pps

Prinsip 8: Menghormati dan mendukung hak anak dalam pengaturan keamanan

Bagian mengenai pengaturan keamanan ini perlu diperhatikan oleh perusahaan yang beroperasi dalam konteks yang dicirikan oleh faktor-faktor di bawah. Sumber eksternal diberikan di bagian lampiran bila sumber data yang komprehensif tersedia oleh negara.

- Zona yang terdampak oleh konflik atau daerah yang tidak stabil
- Daerah pedesaan dan terpencil
- Daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi
- Daerah dimana negara memerlukan pasukan keamanan publik
- Negara tanpa sistem pengadilan anak

Elemen-elemen penghormatan untuk kebijakan atau kode etik:

Larang perekrutan atau penggunaan anak-anak dalam pengaturan keamanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penyedia keamanan.

Terangkan kode etik yang tegas untuk melarang hukuman fisik atau eksploitasi anak, kemudian jelaskan mekanisme pendisiplinan terhadap personil keamanan yang melakukan pelanggaran.

Sediakan rincian mengenai bagaimana elemen perlindungan anak disertakan dalam pelatihan HAM untuk personil keamanan. Ini meliputi prosedur untuk berurusan dengan anak-anak yang dituduh melakukan tindakan kriminal terhadap properti perusahaan.

Larang perekrutan personil yang telah melakukan pelanggaran terhadap HAM, termasuk hak anak-anak.

Sumber-sumber untuk mengembangkan kebijakan dan kode etik mengenai pengaturan keamanan

The Voluntary Principles on Security and Human Rights menyediakan sumber bagi perusahaan di sektor ekstraktif mengenai cara mengimplementasikan pengaturan keamanan berdasarkan kerangka kerja yang menghormati HAM – www.voluntaryprinciples.org/resources

International Code of Conduct for Private Security Service Providers. Inisiatif multi-stakeholder ini dibentuk oleh Pemerintah Swiss – sumber ini meliputi kode etik dalam berbagai bahasa dan tersedia di www.icoc-psp.org

Prinsip 9: Membantu anak-anak yang terdampak oleh situasi darurat

Bagian mengenai anak-anak yang terdampak oleh situasi darurat ini perlu diperhatikan bila perusahaan beroperasi dalam konteks yang dicirikan oleh faktor-faktor di bawah. Sumber-sumber eksternal tersedia di lampiran bila sumber data yang komprehensif tersedia oleh negara.

- Terdapat pola bencana alam (terkena banjir, kekeringan, gempa bumi dan angin topan)
- Instabilitas atau represi politik
- Wilayah terdampak konflik yang mengalami kekerasan berskala masif atau risiko signifikan lainnya yang merugikan anak-anak
- Wilayah yang terdampak oleh kekurangan pangan dan gizi serius
- Industri yang terlibat dalam aktivitas berbahaya dengan risiko signifikan untuk menyebabkan bencana alam.

Elemen-elemen penghormatan untuk kebijakan atau kode etik:

Jelaskan tindakan pencegahan khusus yang diberlakukan perusahaan untuk mengamankan hak anak di wilayah yang terdampak oleh konflik. Terangkan sosialisasi dan pelatihan bagi karyawan dan mitra bisnis mengenai penghormatan terhadap HAM, termasuk hak anak di wilayah yang terdampak oleh konflik.

Bagi perusahaan yang terlibat dalam tanggap darurat terhadap bencana alam, jelaskan bagaimana perusahaan bekerja dengan pemerintah setempat dan agensi bantuan kemanusiaan, serta hindari dampak negatif

Terangkan atau pertimbangkan kebutuhan anak yang bersifat khusus dalam kebijakan perencanaan kontijensi untuk situasi darurat yang muncul sebagai akibat dari operasi bisnis.

Elemen-elemen dukungan untuk kebijakan atau kode etik:

Bagi perusahaan yang secara reguler membantu (melalui kontribusi finansial, barang atau lainnya) dalam situasi darurat yang disebabkan oleh bencana alam, jelaskan bagaimana perusahaan mendukung anak-anak yang terdampak oleh situasi darurat melalui kerjasama dengan otoritas setempat dan agensi kemanusiaan, berdasarkan pada kebutuhan penduduk setempat serta praktik-praktik baik yang diakui secara umum.

A&M Group: Kebijakan HAM untuk wilayah yang terdampak oleh konflik

"1. Selagi mendapatkan keuntungan dari, atau beroperasi di, area yang terdampak konflik atau berisiko tinggi, kami tidak akan mentolerir ataupun mengambil keuntungan dari, berkontribusi terhadap, membantu atau memfasilitasi oleh pihak-pihak yang menerapkan:

- i. Segala bentuk tindak penyalahgunaan, kekejaman, tidak manusiawi dan menurunkan martabat orang;
- ii. Segala bentuk kerja paksa; yang berarti pekerjaan atau layanan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah ancaman hukuman yang mana orang tersebut tidak melakukannya secara sukarela;
- iii. bentuk-bentuk terburuk dari pekerjaan anak;
- iv. Pelanggaran HAM yang sangat buruk seperti kekerasan seksual berskala masif;
- v. Kejahatan perang atau kejahatan serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.

2. Kami akan segera menghentikan pelibatan pemasok yang telah kami identifikasi memiliki risiko tinggi mengambil keuntungan dari, atau terhubung dengan, segala pihak yang melakukan kejahatan serius sebagaimana didefinisikan di ayat 1."

- A&M Group Ltd., 'Conflict Zone Policy'

Sumber-sumber untuk mengembangkan kebijakan dan kode etik terkait anak-anak yang terdampak oleh situasi darurat

Global Compact and Principles for Responsible Investment, 'Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected and High-Risk Areas: A resource for companies and investors' Memberikan panduan mengenai bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip United Nations Global Compact, selagi mempertahankan produktifitas dan meminimalisir efek negatif baik kepada perusahaan maupun masyarakat – PDF dapat diakses di: www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development, 'OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas' Memberikan panduan bagi perusahaan hulu dan hilir untuk menghormati HAM selagi bekerja di situasi darurat; lampiran II menerangkan model kebijakan yang mengikutsertakan poin mengenai pekerja anak – tersedia dalam Bahasa Inggris dan Perancis di: www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf

Prinsip 10: Memperkuat upaya masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak anak

Bagian mengenai masyarakat dan pemerintah ini perlu diperhatikan oleh perusahaan yang beroperasi di konteks yang dicirikan oleh faktor-faktor di bawah. Sumber-sumber eksternal tersedia di lampiran bila sumber data yang komprehensif tersedia oleh negara.

- Banyak kasus penyuapan dan korupsi
- Penghindaran pajak (menghindari membayar melalui cara-cara ilegal) dan pengurangan pajak (menggunakan cara-cara legal untuk mengurangi pajak)
- Sektor informal yang besar
- Kemiskinan, sehingga kurang fasilitas pendidikan dan kesehatan

Elemen-elemen penghormatan untuk kebijakan atau kode etik:

Berikan pernyataan mengenai bagaimana perusahaan mematuhi undang-undang nasional dan prinsip internasional mengenai kewajiban pajak korporat. Pernyataan ini harus menyertakan komitmen untuk membayar seluruh pajak, biaya dan royalty kepada pemerintah lokal di negara tempat beroperasi.

Tetapkan kebijakan untuk tidak mentolerir segala bentuk penyuapan, korupsi, pemerasan dan penggelapan, kemudian terangkan aturan-aturan penegakkan.

Komitmen untuk menjamin kepentingan anak-anak di seluruh inisiatif investasi masyarakat.

Bagi perusahaan yang terlibat dalam kontrak layanan publik di sektor sosial (mis. pendidikan, kesehatan, suplai air), komitmen untuk mengikuti dan menerapkan norma pemerintah dan layanan untuk memastikan anak-anak yang rentan memiliki akses ke layanan esensial.

Elemen-elemen dukungan untuk kebijakan atau kode etik:

Jelaskan komitmen perusahaan untuk bekerja dengan pemerintah lokal dalam merancang dan memberikan investasi masyarakat guna memenuhi prioritas pembangunan nasional.

Gunakan pengaruh perusahaan, melalui dialog dan advokasi, untuk mendorong pemerintah memenuhi kewajiban mereka dalam pemenuhan hak anak.

Sumber-sumber untuk mengembangkan kebijakan dan kode etik terkait penguatan upaya masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak

International Chamber of Commerce, 'ICC Rules on Combating Corruption'. Menyoroti regulasi perusahaan; bagian II menjelaskan pengadopsian dan penerapan kebijakan yang mendukung kepatuhan terhadap aturan dan pemberantasan korupsi – informasi lebih lanjut mengenai aturan dan teks lengkap dapat dilihat di: www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption.

Organisation for Economic Co-operation and Development, 'OECD Guidelines for Multinational Enterprises'. The content in 'Combating Bribery' (Bab 1, bagian 4) dapat digunakan untuk mengembangkan pernyataan kebijakan perusahaan mengenai pemberantasan praktik penyuapan dan korupsi – PDF dapat dilihat di: www.oecd.org/corporate/mne/1922428.pdf; informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.oecd.org/daf/inv/mne.

OECD, 'The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action'. Konten dalam bab 'Combating Bribery' (bab 1, bagian 4) dapat digunakan untuk mengembangkan pernyataan kebijakan perusahaan terkait pemberantasan praktik penyuapan dan korupsi – membuat bantuan lebih efektif, dengan komitmen inti untuk mengawinkan pendekatan sektor publik dan swasta dalam membantu pemerintah mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pembangunan nasional mereka – PDF dapat diakses di www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm.

SUMBER-SUMBER EKSTERNAL BAGI PERUSAHAAN DAN ANALISIS KONTEKS HAK ANAK

Sumber eksternal tersedia apabila negara memiliki sumber data yang komprehensif

Prinsip 2: PEKERJA ANAK faktor-faktor utama untuk perusahaan dan hak anak	Link
Usia kelulusan sekolah tidak sama dengan usia diperbolehkan kerja	UNESCO, 'Information by country', http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableView/document.aspx?ReportId=198&IF_Language=eng ; select country then 'education' ILO, 'Ratifications of C138 – Minimum Age Convention, 1973' – menunjukkan usia minimum untuk diperbolehkan kerja, www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312283
Risiko tinggi keberadaan pekerja anak di daerah, negara atau kawasan	UNICEF, <i>ChildInfo</i> , 'Percentage of children aged 5–14 engaged in child labour', www.childinfo.org/labour-countrydata.php United States Department of Labor, 'Youth & Labor', www.dol.gov/dol/topic/youthlabor/childlaborstatistics.htm
Tingkat pekerja migran yang tinggi	World Bank, 'Net migration rates', http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM ILO, <i>Labour Migration Branch</i> , www.ilo.org/migrant/lang--en/index.htm
Rendahnya ketersediaan sekolah, dan rendahnya tingkat pendaftaran serta kelulusan sekolah	United Nations Statistics Division, 'Social Indicators – Work', http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/default.htm UNICEF, 'Statistics and Monitoring', www.unicef.org/statistics/index_countrystats.html – select country, then scroll down to 'Education'

Kemiskinan	World Bank, 'Data: Indicators', http://data.worldbank.org/indicator – cari bagian mengenai 'Poverty' kemudian klik indikator untuk daftar statistik berdasarkan negara
Keberadaan ekonomi informal	ILO, LABORSTA Internet, 'Women and men in the informal economy', http://laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html
Sistem hukum, kebijakan dan institusi yang lemah	World Bank Group, 'Worldwide Governance Indicators', http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp , tabel interaktif untuk membandingkan ekonomi lintas enam indikator pemerintahan
Biaya pekerja	ILO, LABORSTA Internet, 'Statistics by topic', www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject?_afrcLop=2339454976311655 , pilih 'Labour cost'
Rasio modal-buruh yang rendah	

Prinsip 3: KERJA LAYAK faktor-faktor utama untuk perusahaan dan hak anak	Link
Jumlah pekerja muda yang tinggi	ILOSTAT Database, www.ilo.org/ilostat – pilih 'Browse by subject', kemudian 'Youth' United States Department of Labor, 'Youth & Labor: Child Labor Statistics', www.dol.gov/dol/topic/youthlabor/childlaborstatistics.htm
Tingkat pekerja migran yang tinggi	World Bank, 'Net migration rates', http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM ILO, Labour Migration Branch, www.ilo.org/migrant/lang--en/index.htm

Kemiskinan	World Bank, 'Data: Indicators', http://data.worldbank.org/indicator – cari bagian mengenai 'Poverty' kemudian klik indikator untuk daftar statistik berdasarkan negara
Program magang wajib atau berskala masif yang digunakan untuk mengkompensasi kekurangan pekerja	
Kurangnya penghormatan terhadap kebebasan berserikat dan negosiasi kolektif	ILO, Dialogue Data, www.ilo.org/ifpdial/information-resources/dialogue-data/lang--en/index.htm – cari bagian mengenai 'trade union density and collective bargaining coverage'
Keberadaan ekonomi informal	ILO, LABORSTA Internet, 'Women and men in the informal economy', http://laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html – pilih cross-country database

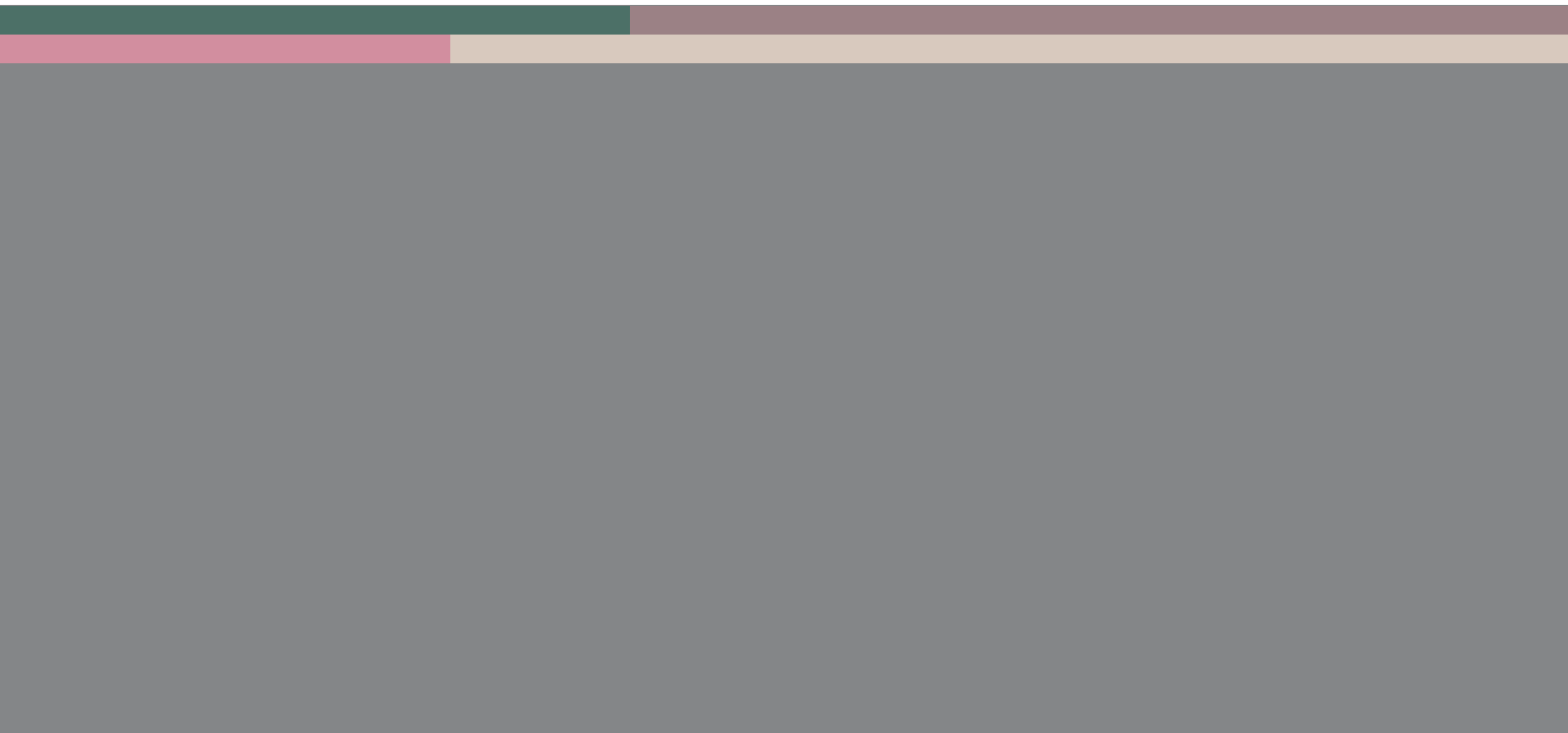
Prinsip 8: ANAK-ANAK YANG TERDAMPAK OLEH PENGATURAN KEAMANAN faktor-faktor utama untuk perusahaan dan hak anak	Link
Zona yang terdampak oleh konflik dan tidak stabil	International Institute for Strategic Studies, https://acd.iiss.org/en - pilih 'browse all conflicts'
Daerah pedesaan dan terpencil	World Bank, 'Data – Rural population', http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL
Daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi	United Nations Office on Drugs and Crime, 'Data', www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html

Daerah dimana negara memerlukan penempatan pasukan keamanan publik	
Negara tanpa sistem pengadilan anak	

Prinsip 9: ANAK-ANAK YANG TERDAMPAK OLEH SITUASI DARURAT faktor-faktor utama untuk perusahaan dan hak anak	Link
Pola bencana alam (terkena banjir, kekeringan, gempa bumi dan angin topan)	Alliance Development Works, 'World Risk Report 2012: Focus – Environmental degradation and disasters' – PDF dapat diakses di www.ehs.unu.edu/file/get/10487.pdf Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2013, http://risk.preventionweb.net:8080/capreviewer/main.jsp?tab=1
Instabilitas atau represi politik	World Bank Group, 'Worldwide Governance Indicators', http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp , tabel interaktif untuk membandingkan ekonomi lintas enam indikator pemerintahan
Daerah terdampak konflik yang mengalami kekerasan berskala masif atau risiko signifikan lainnya yang merugikan anak-anak	International Institute for Strategic Studies, https://acd.iiss.org/en - pilih 'browse all conflicts'
Daerah yang terdampak oleh kekurangan pangan dan gizi serius	Food and Agriculture Organization of the United Nations, 'Food Security Statistics', www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/

Industri terlibat dalam aktivitas berbahaya dengan risiko tinggi menimbulkan bencana alam	
---	--

Prinsip 10: MASYARAKAT DAN PEMERINTAH faktor-faktor utama untuk perusahaan dan hak anak	Link
Banyak kasus penyuapan dan korupsi	World Bank Group, 'Worldwide Governance Indicators', http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp , tabel interaktif untuk membandingkan ekonomi lintas enam indikator pemerintahan
Penghindaran pajak (menghindari membayar melalui cara-cara ilegal) dan pengurangan pajak (menggunakan cara-cara legal untuk mengurangi pajak)	
Sektor informal yang besar	ILO, LABORSTA Internet, 'Women and men in the informal economy', http://laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html – pilih cross-country database
Kemiskinan, sehingga kurang fasilitas pendidikan dan kesehatan	World Bank, 'Data: Indicators', http://data.worldbank.org/indicator – cari bagian mengenai 'Poverty' kemudian klik indikator untuk daftar statistik berdasarkan negara



Save the Children

unicef 
for every child